

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/343256324>

SEKURITISASI ISU MIGRASI DI POLANDIA : KEAMANAN NASIONAL ATAU SOLIDARITAS REGIONAL?

Article · July 2020

DOI: 10.29303/ijps.v1i1.33

CITATIONS

0

READS

949

1 author:



Mega Nisfa Makhroja
University of Mataram

9 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Literacy Education for Marginal Women in West Lombok [View project](#)

Sekuritisasi Isu Migrasi di Polandia Pasca Krisis Pengungsi di Uni Eropa

Mega Nisfa Makhroja

International Peace and Conflict Studies Collegium Civitas, Warsawa, Polandia
meganisfa@gmail.com

ABSTRACT

This article examined the securitization of migration issue in Poland as respond of the refugee crisis in Europe. The Polish government decided not to accommodate more refugees from Africa and the Middle East for reasons of national security. Homogeneous character of society will be disturbed by massive waves of migration. On the other hand, as a member of the European Union, Poland has an obligation to follow the scheme of the distribution of refugee quota to his country. Using securitization analysis of non-traditional security issues, this research will describe the securitization process that starts with securitizing actors, speech acts, existential threats, referent objects, audiences, and functional actors. The securitization process is carried out by constructing an issue that was not originally a security issue to a security issue. The findings of this study indicate that the Polish government's policy of rejecting refugees is a form of securitization of the issue of migration as a threat to its national security.

Keywords: Migration, Refugee, Securitization, Poland, European Union.

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang sekuritisasi isu migrasi Polandia dalam merespon krisis pengungsi di Eropa. Pemerintah Polandia memutuskan untuk tidak menampung lebih banyak pengungsi dari kawasan Afrika dan Timur Tengah dengan alasan keamanan nasional. Karakter masyarakat yang homogen akan terganggu dengan gelombang migrasi yang massif. Disisi lain, sebagai anggota Uni Eropa, Polandia memiliki kewajiban untuk mengikuti skema pembagian kuota pengungsi ke negaranya. Menggunakan analisis sekuritisasi terhadap isu keamanan non tradisional, penelitian ini akan menjabarkan proses sekuritisasi yang dimulai dengan *securitizing actor, speech act, existential threat, referent object, audience, dan functional actors*. Proses sekuritisasi ini dilakukan dengan mengkonstruksi sebuah isu yang awalnya bukan isu keamanan menjadi isu keamanan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Polandia menolak pengungsi merupakan bentuk sekuritisasi isu migrasi sebagai ancaman keamanan nasionalnya.

Kata kunci: Migrasi, Pengungsi, Sekuritisasi, Polandia, Uni Eropa.

PENDAHULUAN

Meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah dan Afrika dalam satu dekade terakhir berdampak pada kenaikan gelombang pengungsi ke Uni Eropa. Polandia, sebagai salah satu negara di Eropa tengah turut menjadi salah satu tujuan imigrasi bagi pengungsi yang sebagian besar dari Suriah. Posisi strategis Polandia sebagai salah satu kekuatan ekonomi di Eropa menjadi faktor penarik imigran, baik untuk bekerja atau mengungsi, ke Polandia.

Pada akhir tahun 2015, Kemenangan partai sayap kanan di Polandia mengubah peta politik pemerintah terhadap migran. Unggul 34% dari total pemilih, membuat partai *Law and Justice* atau *Prawo i Sprawiedliwość* (PiS) di Polandia mengubah beberapa kebijakan terhadap imigran. Kelompok ultranasionalisme ini secara tegas menolak pembagian kuota pengungsi oleh Uni Eropa yang disepakati melalui Traktat Lisbon (2007). Serta menolak imigran muslim dari kawasan Timur

Tengah dan Afrika ke Polandia karena dianggap memiliki keterkaitan erat dengan terorisme dan radikalisme. Sentimen meningkat setelah terjadi serangan teror di Paris tahun 2015. Namun demikian, pemerintah Polandia menegaskan bahwa penolakan bukan karena agama dan etnik, namun lebih pada keinginan menjaga keamanan nasional (Al Jazeera, 2019).

Di sisi lain, sebagai anggota Uni Eropa, Polandia memiliki kewajiban untuk menaati hukum yang berlaku di Uni Eropa, yaitu kesepakatan untuk menerima kuota jumlah pengungsi. Kelebihan kuota pengungsi Yunani mendorong pemerintah Uni Eropa melakukan relokasi pengungsi ke negara-negara Eropa lainnya, termasuk Polandia. Pemerataan yang sesuai dengan Artikel no. 78 dalam Traktat Lisbon yang mengatur *Common European Asylum System (CEAS)*, dimana setiap negara anggota Uni Eropa harus mau mendukung program pemerataan jumlah pengungsi ini ke negaranya. Pada saat penandatanganan CEAS, yaitu Traktat Pimpinan Parlemen Polandia diduduki oleh partai *Civic-Platform* yang beraliran liberal konservatif meratifikasi kesepakatan untuk melakukan kebijakan bersama dalam menangani masalah pengungsi.

Solidaritas di level regional dipertanyakan ketika Polandia dianggap melawan hukum Uni Eropa terkait pengungsi. Pengadilan tinggi Uni Eropa menyatakan bahwa Polandia, Ceko, dan Hungaria masuk jajaran negara yang mendobrak hukum Eropa untuk pengungsi dimana setiap anggota EU harus menerima relokasi pengungsi sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan (Rankin, 2019). Namun ketiga negara tersebut tidak menerima jumlah pengungsi yang masuk atau bahkan kurang dari kuota yang disyaratkan.

Polandia tidak hanya melakukan penolakan terhadap aturan Eropa, bersama dengan kelompok negara Visegrad lainnya, yaitu Slovakia, Ceko, dan Hungaria menolak ratifikasi kesepakatan *Global Compact Migration PBB*. Kesepakatan tersebut merupakan perjanjian global untuk mendorong migrasi global yang legal dan aman. Isu ini semakin menarik ketika dianalisis dari perspektif hubungan internasional, perubahan preferensi politik sebuah negara dapat berubah secara dinamis dalam merespon ancaman keamanan, baik keamanan tradisional maupun non tradisional. Tidak dipungkiri isu migrasi global menjadi kajian penting dalam keamanan.

Adapun pertanyaan penelitian adalah "Mengapa pemerintah Polandia melakukan sekuritisasi isu migrasi pasca Krisis Migrasi Eropa 2015?". Penelitian ini penting karena tingginya tingkat sensitifitas masyarakat Eropa dan Amerika Serikat terhadap migran paska musim semi arab mendorong beberapa konflik sosial di masyarakat. Dengan mengetahui kondisi nasional dan proses sekuritisasi yang terjadi, dapat dipahami mengapa migran dapat menjadi ancaman bagi sebuah negara.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan pemerintah Polandia dalam respon krisis migrasi di Eropa melalui analisa teori sekuritisasi. Proses sekuritisasi ini penting diketahui untuk melihat sudut pandang negara sebagai aktor sekuritisasi dalam mengeluarkan kebijakan nasional maupun internasional. Meskipun demikian, dalam mencapai kepentingan nasional tidak selalu sejalan dengan keamanan regional dan global.

TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum merujuk pada pembahasan lebih detail, penting untuk mengetahui beberapa penelitian terdahulu yang sejalan dengan kajian sekuritisasi isu migrasi di Polandia. Hal ini bertujuan untuk memberikan kebaruan terhadap penelitian sebelumnya dari sudut pandang sekuritisasi teori. Adapun beberapa penelitian sebelumnya membahas tentang isu migrasi dan keamanan yang bisa diajukan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu diklasifikasikan menjadi dua, pertama yang membahas tentang populisme di Eropa dan Amerika Serikat, kedua yang membahas tentang Krisis migrasi di Polandia dan Eropa, dan ketiga yang membahas tentang teori sekuritisasi, dan keempat perjanjian kerjasama di Uni Eropa dan Global mengenai migrasi.

POPULISME DI UNI EROPA DAN AMERIKA SERIKAT

Schain (2018) menjelaskan tentang peningkatan gerakan populisme di Uni Eropa dan Amerika dalam satu dekade terakhir berdampak pada perubahan kebijakan luar negeri negara-negara tersebut. Terdapat 4 aspek yang mendukung populisme radikal-kanan di Uni Eropa dan Amerika Serikat, yaitu a) Ketidakstabilan kondisi ekonomi, b) imigrasi dan dilema keragaman, c) migrasi, keamanan, dan "krisis", dan d) Penyelarasan Politik dan Pemilih. Dewasa ini, tren pemilihan politik di Eropa dan Amerika Serikat mempromosikan gelombang populisme. Mengenai dampaknya, migrasi sebagai salah satu faktor utama yang mendukung populisme adalah AS dan Eropa. Hal tersebut turut dipicu oleh meningkatnya keberagaman di lingkungan sosial serta proses pemilu yang dimenangkan oleh sayap kanan mendorong kebijakan ketat terhadap pengungsi. Masyarakat lokal turut merasa bahwa keberadaan migran mengancam keamanan nasional mereka.

Pendapat ini didukung oleh Galasso (2017) yang melihat bahwa dampak kemenangan populisme di Eropa dan Amerika berdampak pada kinerja NGO Internasional, khususnya mereka yang menangani masalah konflik sosial masyarakat dan pengungsi. Dari tinjauan politik, ada eskalasi kekuatan partai sayap kanan di Eropa dan Amerika Serikat yang mendorong populisme (sebagai wujud demokrasi) di negara-negara maju. Sementara itu, solidaritas global di antara partai kanan juga menguat. Sedangkan kelompok sayap kiri ekstrim mulai kehilangan kredibilitasnya di dalam masyarakat. Sejak tahun 1980 kelompok sayap kanan sudah memiliki pemilih besar dalam memenangkan pemilu dan secara pimpinan organisasi, politisi dan organisasi sayap kanan memiliki dampak tidak langsung penting bagi keberhasilan kelompok ini. Berdasarkan opini publik, kebangkitan populisme di AS dan UE memiliki ketakutan yang berbeda terhadap migrasi. Uni Eropa lebih fokus tentang pengungsi dan krisis migrasi yang terkait dengan islamofobia, sementara AS lebih fokus tentang isu perbatasan antara AS dan Meksiko.

Berdasarkan kedua penelitian ini, tidak dipungkiri bahwa sentimen terhadap migran di Eropa dan AS menguat dan berdampak pada perubahan kebijakan mereka. Meskipun tidak dialami oleh seluruh negara Eropa, namun secara umum trennya meningkat.

MIGRASI DAN KEAMANAN SECARA GLOBAL

Weiner (1990) dalam tulisannya *Security, Stability and International Migration* mengatakan bahwa secara analisis teoritis beberapa alasan mengapa migrasi internasional menjadi masalah ancaman bagi keamanan nasional sebuah negara, yaitu:

- a) Pengungsi dan migran adalah sumber konflik internasional.
- b) Pengungsi dan migran adalah ancaman politik negara penerima.
- c) Pengungsi dikhawatirkan menjadi ancaman budaya nasionalisme.
- d) Pengungsi dan imigran dapat mengakibatkan konflik internasional.

Huysmans (2006), *Politik Ketidakamanan: Ketakutan, Migrasi dan suaka di Uni Eropa*. Huysman, menggambarkan tantangan ketidakamanan terhadap migrasi di Eropa. Gagasan penulis menyangkut masalah ketidakamanan dan desekuritisasi (seperti migrasi). Dia menyebutkan bahwa keamanan adalah tentang pembingkai. Ketidakamanan dapat dipengaruhi oleh kebijakan nasional dan internasional. Secara rinci, buku ini menjelaskan tentang bagaimana kebebasan dari ancaman eksistensial dan konstitusi komunitas yang tidak aman. Politik Eksistensial: Konstitusi otonomi dan persatuan politik yang tidak aman dapat mendistribusikan ketakutan dan kepercayaan. Mengelola inklusi dan pengucilan, penataan alienasi dan kecenderungan terhadap kekerasan. Upaya melakukan de-sekuritisasi migrasi dapat dilakukan dengan mendalami pengetahuan keamanan dan konsep-konsep politik.

Konsep 'rasionalitas keamanan' menarik perhatian pada pentingnya kategori kejelasan yang diinvestasikan dalam dan melintasi praktik keamanan. Rasionalitas keamanan mendefinisikan arti keamanan. Mereka mendefinisikan logika praktik keamanan, tentang bagaimana praktik keamanan memodulasi objek pemerintah, mengintegrasikan peristiwa dan perkembangan yang terfragmentasi, dan memperkenalkan teknologi spesifik untuk mengatur kebebasan. Dengan demikian, de-sekuritisasi keamanan dapat dilakukan melalui perubahan pola pikir.

Borbeau (2011), *Securitization of Migration*, melakukan investigasi secara mendalam terkait proses sekuritisasi migrasi. Dalam prosesnya peran agen sekuritisasi sangat penting, khususnya agen pemerintah, sangat penting untuk memberikan justifikasi bahwa isu tersebut adalah isu keamanan. Mengambil contoh di Kanada dan Prancis, studi yang dilakukan Borbeau juga melihat peran media untuk mendorong isu migrasi sebagai isu keamanan memang ada, namun tidak begitu signifikan penting. Dalam beberapa kasus, sekuritisasi isu migrasi bisa dipolitisasi sebagai pendukung proses pemilihan umum. Namun demikian, Borbeau menekankan bahwa pada kasus yang terjadi di Prancis dan Kanada, migrasi tidak hanya dipahami sebagai ancaman eksistensial terhadap identitas budaya.

Castles (2013) dalam bukunya *The Age of Migration: International Population in New World Order*. Pada salah satu *chapter* menjelaskan tentang Budaya, Identitas dan komunitas. Budaya berperan penting dalam membentuk identitas kaum minoritas sehingga berdampak pada eksklusivisme dan diskriminasi kelompok. Hal ini menjadi penting untuk menjaga stabilitas sosial masyarakat dalam kelompok minoritas sehingga masalah personal dan group yang melibatkan hubungan migran dan penduduk lokal bermasalah (2013, p. 37). Etnisitas dan migrasi menjelaskan bahwa

keberadaan etnis minoritas di sebuah negara dapat menimbulkan ancaman sosial. Kelompok etnis minoritas dan migrasi seperti yang terjadi. Hal serupa terjadi di Polandia, bisa jadi keberadaan imigran menjadi ancaman sosial masyarakat.

Bello (2017), *International Migration and International Security: Why Prejudice is a Global Security Threat* menemukan bahwa mengapa prasangka menjadi ancaman keamanan global? Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang menjelaskan fakta, narasi dan ancaman serta alternatifnya. Studi ini paling memprihatinkan dari krisis migrasi global. Penulis juga menggambarkan dasar sekuritisasi migrasi dalam krisis Mediterania, jenis-jenis ancaman, inklusi atau pengecualian. Menarik, dia menyebutkan tentang ancaman luar biasa dan alternatif apa yang harus dipecahkan. Sebagian besar, gagasan penelitian tentang penerapan teori Buzan secara khusus dalam masalah migrasi Eropa.

Ancaman terbesar yang dihadapi dunia global tentang prasangka dan kurang saling memahami. Itu sebabnya, dari kurangnya komunikasi, dapat dipengaruhi untuk menuai pidato kebencian untuk kelompok lain. Peristiwa 9/11 memiliki dampak yang kuat untuk membangun prasangka terhadap Muslim di Eropa. Penulis menjelaskan solusi alternatif melalui dialog antar kelompok untuk meredam konflik.

KRISIS MIGRASI DI POLANDIA

Wiacek (2017) dalam penelitiannya *Poland's Refugee Policy and Polish Society between Value of Survival and Self Expression*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini melihat sudut pandang yang lebih heterogen. Masyarakat Polandia cukup ramah terhadap turis asing dan Wiacek menguraikan alasan utama masyarakat Polandia melakukan penolakan terhadap imigran karena faktor homogenitas. Melalui pendekatan kultural dan hubungan internasional, Wiacek memberikan penjelasan tentang sisi lain dari Polandia terhadap *refugee*. Jauh sebelumnya, Polandia merupakan bangsa yang terbuka terhadap migran. Bahkan sebagian besar kelompok muslim Tatar di Polandia diterima dengan baik sejak 700 tahun silam. Polandia tidak anti islam dan mereka punya "Muslim sendiri". Penekanan yang diberikan oleh Wiacek adalah anti migran Muslim adalah *refugee* yang datang ke Polandia dengan dokumen yang tidak lengkap. Berbeda dengan Jakuslawski, Wiacek menekankan bahwa bahkan Polandia menyusun proyek perdamaian di Lebanon terkait *refugee*. Sehingga tidak sepenuhnya benar bahwa Polandia menolak *refugee* Muslim.

Jaskulowski (2019), *The Everyday Politics of Migration Crisis in Poland*. Penelitian ini menjelaskan detail tentang situasi di Polandia terhadap migrasi. Hal yang menarik, penulis menyebutkan detail tentang karakter Nasionalisme orang Polandia dan Islamofobia mereka. Latar belakang sejarah mempengaruhi karakter nasionalisme Polandia dan mereka melihat masalah pengungsi sebagai ancaman nasional. Namun demikian, orang Polandia tetap mau menerima migran dan pengungsi apabila mereka memenuhi persyaratan. Buku ini menjelaskan lebih detail tentang betapa dilematismenya Kebijakan di Polandia terhadap krisis migrasi antara ketakutan dan empati terhadap migran. Penelitian ini mengadopsi perspektif keamanan nasional dan keamanan global.

KERJASAMA INTERNASIONAL TERKAIT MIGRASI INTERNASIONAL

Selain memahami konsep migrasi dan keamanan, penting untuk mengetahui bagaimana perjanjian kerjasama di Uni Eropa untuk regulasi migran. *Common*

European Asylum System (2016) merupakan kesepakatan bersama yang fokus membangun UE sebagai area perlindungan dan menempatkan hak asasi manusia dasar masih membantu orang lain. Perlindungan internasional diberikan kepada para migran yang memenuhi syarat sebagai pengungsi karena takut akan penganiayaan. Semua negara anggota harus menerima difusi pencari suaka di negara mereka. CEAS adalah aturan utama untuk mendapatkan status suaka di UE, memiliki kekuatan politik yang kuat. Proposal ini merupakan pengembangan dari Regulasi Dublin dan terdiri dari pembagian tanggung jawab yang lebih adil dalam anggota UE, aturan umum, saluran hukum yang aman, dan perlindungan untuk masuk ke UE.

Sebagai tujuan utama pengungsi, UE menerima sejumlah besar migran setiap tahun. Pengungsi penerima perbatasan paling banyak berasal dari Italia, Inggris, dan Spanyol. Jumlah besar migran setiap tahun perlu diubah ke daerah lain, maka setiap anggota UE lainnya harus bergantung pada penerimaan para pengungsi. Namun, beberapa negara menolak jumlah pengungsi yang dibagi karena preferensi nasional mereka. Polandia dan Slovakia sebagai sampel, mereka tidak mau menerima kuota pengungsi yang dibebankan. Hal ini menimbulkan kecaman dan tuntutan dari Pengadilan Tinggi Uni Eropa.

Berikutnya adalah Rencana Strategis UNHCR 2017-2021 (United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), 2017). Menanggapi eskalasi konflik migrasi di seluruh dunia, UNHCR mencoba menangani tantangan dan peluang yang menjadi ciri perpindahan paksa di lingkungan global yang kompleks. Kemudian UNHCR membuat pedoman strategis menuju migrasi dan pengungsi. Ada 5 pekerjaan inti: Lindungi, Tanggapi, Sertakan, Berdayakan, dan Selesaikan. UNHCR Berfokus pada status pengungsi di bawah krisis dan pemindahan paksa. Strategi ini mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan “Meninggalkan seorang pun” dan mengembangkan pendekatan baru aksi kemanusiaan dan mengakui perpindahan orang tidak hanya masalah kemanusiaan tetapi juga tantangan politik dan pembangunan.

Terakhir *Global Compact* tentang Migrasi dan Pengungsi (GCM dan GCR) Desember 2018 (Refugeemigrants, 2018). Perjanjian global ini mengadopsi bagian dari perjanjian global tentang pengungsi dan menyimpulkan perjanjian tersebut menjadi masalah migrasi internasional. Perjanjian ini mengadopsi Deklarasi New York tentang Migran dan pengungsi. Sebagai kesepakatan terbaru tentang migrasi, proses GCM telah menjadi tiga fase. Fase pertama tentang Konsultasi untuk memutuskan sesi-sesi tematik, fase kedua tentang Inventarisasi untuk menciptakan dimensi GCM, dan yang terakhir adalah tentang fase Negosiasi untuk mengumpulkan garis besar rekomendasi dalam draft akhir.

Berdasarkan rangkaian tinjauan pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa populisme adalah salah satu penyebab meningkatnya sensitifitas terhadap migran. Namun demikian, sejak beberapa dekade terakhir, migrasi memang terkait dengan isu keamanan karena melibatkan perpindahan orang dari satu negara ke negara lain. Penelitian ini menempatkan isu migrasi sebagai salah satu isu keamanan yang mampu mengancam keamanan nasional suatu negara. Ancaman tersebut dapat berupa pengaruh identitas minoritas yang masuk atau dampak terhadap perenangan budaya dalam masyarakat. Namun demikian, beberapa hukum internasional yang bergerak atas nama kemanusiaan perlu dihormati pula sebagai upaya menciptakan kerjasama global yang lebih komperhensif untuk menangani masalah krisis migrasi. Berbeda

dengan penelitian-penelitian sebelumnya, artikel ini lebih menekankan proses sekuritisasi yang terjadi di Polandia sehingga isu migrasi menjadi isu keamanan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, pengumpulan data, analisis data secara induktif membangun dari rincian ke tema umum, dan peneliti membuat interpretasi tentang makna data (Creswell, 2013). Penelitian ini menggunakan data-data sekunder hasil analisa dari penelitian sebelumnya, data-data numerik dari laporan lembaga resmi, serta referensi hasil wawancara dengan tokoh politik terkait melalui portal berita yang kredible. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dari buku-buku teori Hubungan Internasional, *Ebook* mengenai migrasi internasional, hasil penelitian dari berbagai penstudi hubungan internasional, *website* resmi dari pemerintah Polandia, kantor imigrasi, majalah, dan lain-lain.

KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini menggunakan sudut pandang *Copenhagen School*. Teori yang digunakan adalah *Securitization Theory* berdasarkan tulisan Buzan (1998). Pada buku "*Security: A New Framework for Analysis*". Keamanan merupakan upaya untuk bertahan. Hal tersebut terjadi ketika aktor menyampaikan sebuah isu yang menjadi sebuah ancaman terhadap objek yang ditunjuk. Sekuritisasi terjadi ketika aktor menggunakan ancaman untuk menangkap isu keluar dari kondisi "politik normal". Sehingga Sekuritisasi disebut sebagai proses intersubjektivitas yang terbentuk dengan adanya *existential threat* dan memiliki efek politik.

Terdapat lima tahapan sekuritisasi, pertama isu publik (sifatnya tidak dipolitisasi), hal ini berarti negara tidak mengambil kebijakan khusus terkait isu ini. Proses ini terjadi sebelum krisis migrasi Eropa dimana sebelum 2015 Pemerintah Polandia menerima migran masuk ke negaranya dengan baik. Kedua politisasi, dalam hal ini negara memasukkan kebijakan khusus untuk merespon isu ini. Dalam hal ini kebijakan pemerintah Polandia tidak menerima skema pembagian pengungsi. Dalam proses perpindahan dari non politis ke politis terdapat kondisi tertentu yang disebut "*facilitating condition*" sehingga proses sekuritisasi berjalan dengan baik. Berikutnya adalah adanya unit analisa keamanan yang mengacu pada negara atau masyarakat untuk mendorong proses sekuritisasi. Selanjutnya adalah *speech act* atau pernyataan resmi dari tokoh politik yang mempertegas isu ini sebagai ancaman, dan terakhir adalah konstelasi keamanan yang bertujuan untuk menganalisis keamanan dengan konstelasi keamanan yang berbeda (Hartono, 2018). Hasil akhir dari proses sekuritisasi ini adalah "*successful act*" atau "*desecuritization*". Keberhasilan proses sekuritisasi bisa dicapai apabila aktor sekuritisasi mampu meyakinkan *audience*-nya bahwa isu tersebut adalah ancaman. Namun apabila aktor tidak mampu meyakinkan *audience*-nya maka proses tersebut dapat dikatakan gagal.

Terdapat beberapa indikator dalam proses sekuritisasi, yaitu aktor sekuritisasi (*securitizing actor*), pernyataan/pidato (*speech act*), ancaman eksistensial (*existential threat*), obyek referensi (*referent object*), pendengar (*audience*), dan aktor fungsional

(*functional actor*). Aktor sekuritisasi memiliki hak untuk mengklaim sebuah isu sebagai sesuatu yang “luar biasa” untuk mendobrak aturan-aturan dalam proses normal politik yang berlaku sebelumnya, biasanya merupakan aktor pemerintah. Proses sekuritisasi berikutnya adalah pidato/ Pernyataan pimpinan negara yang menjusifikasi isu tersebut sebagai isu keamanan. Ketiga, ancaman eksistensial yang berfungsi sebagai keamanan. Dalam hal ini ancaman Polandia adalah *clash of culture*, terorisme, dan radikalisme. Keempat, obyek referensi, adalah seluruh warna negara Polandia yang dapat terancam sehingga negara perlu melindungi. Kelima, pendengar (*audience*), pemerintah Uni Eropa dan masyarakat global sehingga mereka memahami sikap tegas Polandia menolak imigran muslim. Keenam adalah aktor fungsional, yaitu para pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika (negara-negara muslim) yang akan masuk ke Polandia. Adapun kerangka pemikiran tersebut dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Proses Sekuritisasi isu Migrasi di Polandia

Pemerintah Polandia	Teori Sekuritisasi		Krisis Migrasi di Eropa
Indikator	<i>Securizing Actor</i>	Pemerintah Polandia	Implementasi
	<i>Speech Act</i>	Pernyataan Tokoh Politik	
	<i>Existential Threat</i>	Migran	
	<i>Referent Object</i>	Masyarakat Polandia	
	<i>Audience</i>	Uni Eropa dan Global	
	<i>Functional Actor</i>	Media dan Organisasi Masyarakat	
Sekuritisasi isu migrasi sebagai ancaman keamanan Polandia			

Sumber: hasil olahan penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Polandia menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Eropa Tengah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,2% sejak tahun 1992-2019. Berada pada posisi ketujuh di Uni Eropa dengan nilai GDP sekitar 524 Miliar Euro (Fredriksson, 2019). Tingginya tingkat investasi dan pertumbuhan pasar yang menjadi hub bagi ekonomi Eropa Barat dan Timur membuka kesempatan kerja yang luas. Penggunaan mata uang Polandia (non-Euro) menguatkan konsumsi domestik untuk menjaga keseimbangan pasar. Kelebihan-kelebihan ini yang menjadikan Warsawa, Ibu Kota Polandia sebagai pusat bisnis di Eropa Tengah dan Timur. Pada tahun 2018, UNDP menetapkan Polandia sebagai kelompok “*very high developed country*” atau masuk kategori negara-negara maju. Pengelompokan tersebut berdasarkan asesmen pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang merata.

Pertumbuhan ekonomi yang signifikan, biaya hidup yang relatif murah, serta kesempatan kerja yang tinggi menjadi faktor penarik tingginya migrasi ke Polandia. Arus migrasi tenaga kerja ke Polandia menjadi salah satu penopang ekonomi domestik. Kebutuhan tenaga kerja usia produktif dan tingginya tingkat *aging society* di Polandia menciptakan peluang kerja bagi pekerja migran dari berbagai negara. Sebagian besar pekerja migran berasal dari negara tetangga seperti Ukraina dan

Belarusia. Tidak hanya pekerja migran, para pengungsi juga tertarik ke Polandia mengingat kedekatannya dengan Jerman. Seringkali Polandia dijadikan sebagai negara transit menuju Jerman, namun peluang ekonomi dan kualitas hidup yang baik membuat banyak dari mereka yang bertahan. Dengan demikian, stabilitas keamanan perlu dijaga demi menciptakan kestabilan sosial dan ekonomi. Isu migrasi kemudian di konstruksi sebagai “ide” ancaman keamanan non tradisional melalui proses sekuritisasi.

SEKURITISASI ISU MIGRASI DI POLANDIA

Sebelum pemilihan umum bulan November 2015, Presiden Bronisław Komorowski (Presiden Polandia 2010-2015) dan Aleksander Kwaśniewski (Presiden Polandia 1995-2005) menyampaikan dukungan terbuka terhadap pengungsi melalui surat terbuka yang ditandatangani oleh beberapa pemimpin negara dan akademisi dari negara-negara Eropa Tengah seperti Slovakia, Hungaria, Ceko, Bulgaria, Lithuania, dan Latvia (Komorowski, 2015). Dukungan terbuka tersebut menyatakan bahwa sebagai bagian dari anggota Uni Eropa, negara-negara tersebut mendukung kuota pengungsi ke negaranya meskipun cukup sulit di awal. Pertimbangan kemanusiaan diatas segalanya, kemudian diputuskan bahwa pengungsi seharusnya mendapatkan tempat yang aman dan lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang ingin dibagikan oleh Uni Eropa yaitu menjadikan EU tempat aman bagi semua.

Pada bulan Mei 2015, 72% masyarakat mendukung pengungsi dari zona konflik, jumlah ini termasuk paling tinggi di Eropa. Namun, dukungan menurun menjadi hanya 33% pada April 2016. Jajak pendapat menunjukkan bahwa ketika ditanya secara khusus tentang pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika, oposisi umumnya jauh lebih tinggi. Pada Mei 2015, 53% orang Polandia keberatan menerima pengungsi dari daerah ini. Pada April 2016, jumlah ini meningkat menjadi sebanyak 71% (Public Opinion Research Center, 2016). Pemerintah Polandia yang baru, dibawah pimpinan partai sayap kanan, berperan penting dalam melakukan sekuritisasi terhadap pengungsi. Perannya sebagai **aktor sekuritisasi** signifikan dalam mengubah isu yang sebelumnya bukan ancaman, menjadi ancaman.

Tidak dipungkiri fenomena *Arab Spring* berdampak pada tingginya gelombang pengungsi yang masuk Uni Eropa termasuk ke Polandia. Merespon fenomena tersebut, peta politik Polandia terhadap imigran mulai berubah. Sebelumnya Polandia cukup ramah terhadap pengungsi, namun semenjak kemenangan partai sayap kanan, preferensi terhadap pengungsi berubah.

Salah satu kebijakan yang ditetapkan adalah tidak melakukan ketentuan Uni Eropa terkait penerimaan pengungsi ke Polandia (Traktat Lisbon 2007 dan CEAS 2015). Pengadilan tinggi Uni Eropa menyatakan bahwa Polandia, Hungaria dan Ceko melanggar Undang-undang Uni Eropa terkait pembagian kuota pengungsi. Pada tahun 2015, Uni Eropa melakukan relokasi 160.000 pengungsi dari Italia. Masing-masing negara menerima 15.000 orang pengungsi. Hal ini merupakan kewajiban, mengacu pada Regulasi Dublin dimana setiap pencari suaka yang masuk ke Uni Eropa harus diterima (Quell, 2020). Hal ini merupakan bentuk penertiban, pemeliharaan hukum, dan keamanan internal uni Eropa. Di sisi lain, pemerintah Polandia mengkritisi keputusan tersebut karena ketidak seimbangan kuota untuk masing-masing negara. Sampai saat ini proses hukum masih berlangsung.

Sebagai upaya memperluas ide sekuritisasi, pernyataan sikap politik Anggota Parlemen Polandia untuk Uni Eropa menjadi bentuk **speech act** (pidato) yang menegaskan urgensi isu migrasi sebagai isu keamanan. Beberapa pernyataan politik mengenai sikap pemerintah Polandia terhadap imigran, hal tersebut dirangkum dalam beberapa poin:

- a) Pernyataan Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki, bahwa pemerintahannya tidak ingin menolak imigran dari Afrika Utara dan Timur Tengah (Euronews, 2018).
- b) Anggota Parlemen Polandia untuk Uni Eropa, Dominik Tarczyński dari Partai *Law and Justice*, menyampaikan multikulturalisme bukan *value* dari masyarakat Polandia. Tarczyński menyampaikan bahwa “*For me, multiculturalism is not value*” (Al Jazeera, 2019). Polandia memiliki nilainya sendiri, yaitu homogenitas dibawah etnis orang Polandia.
- c) “*We want o be part of EU, bu we want resepect*” (France24 English, 2017). Pemerintah Polandia ingin menjalankan hukumnya sendiri dan bukan berarti mereka menolak pengungsi. Mereka mengizinkan setiap orang mengajukan izin tinggal di Polandia selama mereka mampu melengkapi dokumennya dan biarkan pemerintah Polandia memutuskan kemudian (Al Jazeera, 2019). Oleh karena itu, penolakan terhadap aturan skema pengungsi seyogyanya dihormati oleh Uni Eropa karena Polandia sebagai negara berdaulat memiliki hukumnya sendiri.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, **existential threat** yang dibangun melalui pidato tersebut adalah keamanan nasional Polandia yang diindikasikan dalam homogenitas didalam masyarakat.

Polandia merupakan negara yang paling homogen di Uni Eropa dengan total 96,7% penduduknya adalah bangsa *polish*. Perbedaan budaya dan agama dengan pengungsi Timur Tengah dikhawatirkan menjadi ancaman dalam integrasi masyarakat. Masih minimnya pengalaman orang Polandia untuk berinteraksi dengan orang asing menjadi “insekuritas” sehingga memunculkan ketakutan akan *clash of culture*. Rusaknya budaya-budaya lokal yang berbaur dengan migran. Berbeda dengan migran dari Ukraina, Belarus atau Rusia. Polandia memiliki beberapa kesamaan budaya termasuk bahasa sehingga prosesnya tidak terlalu sulit (Morath, 2017).

Ancaman-ancaman di atas menjustifikasi bahwa **referent object** (Obyek referensi) yaitu masyarakat Polandia terancam. Perasaan terancam tersebut memunculkan protes di kalangan masyarakat. Kampanye *Poland for the Polish*, gelombang protes 2000 massa di tahun 2016 ini merepresentasikan sikap kelompok ultranasionalis terhadap migran. Penolakan terhadap imigran muslim yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika. *Stereotype* tentang islamofobia pasca peristiwa 9/11 masih mempengaruhi sudut pandang masyarakat kebanyakan tentang Islam. Disamping itu, ketakutan akan masalah ekonomi di lingkungan sosial masyarakat seperti anggapan kedatangan pengungsi hanya akan menghabiskan dana bantuan kemanusiaan negara dan meningkatnya persaingan kerja antara orang lokal dan pendatang.

Komponen dalam sekuritisasi berikutnya adalah **audience (pendengar)**. Pemerintah Polandia ingin proses sekuritisasi ini dipahami oleh Uni Eropa maupun masyarakat global sebagai tindakan preventif. Polandia bukannya tidak bertanggung jawab dalam hal kemanusiaan. Namun, Polandia memiliki karakter sendiri dan ingin melakukan aturannya sendiri. Mereka sudah membantu penanganan pengungsi di

perbatasan Lebanon dan proyek asistensi pengungsi Suriah di Lebanon. Sejak tahun 2012, *Polish Center for International Aid* memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi Suriah di perbatasan Suriah-Lebanon. Terdapat lebih dari 350.000 pengungsi mendapatkan bantuan berupa layanan kesehatan dan pendidikan (*Polish Center for International Aid*, n.d.). Proyek ini juga menjadi alasan bahwa Polandia ikut berpartisipasi dalam menangani krisis migrasi global.

Terakhir dalam proses sekuritisasi adalah **functional actor** (aktor fungsional). *Functional actor* disini adalah aktor-aktor fungsional yang mempengaruhi *securitizing actor* untuk mengeluarkan kebijakan migrasi di Polandia. Beberapa aktor fungsional yang berperan adalah media dan organisasi sosial masyarakat. Pemberitaan media tentang serangan Paris pada tahun 2015 meningkatkan sentimen orang-orang di Polandia terhadap Muslim. Media memandu opini publik terhadap Muslim dan terpengaruh stereotip Muslim sebagai seorang teroris. Pada Mei 2015, 72% orang mendukung pengungsi dari zona konflik; jumlah ini termasuk yang tertinggi di Eropa. Namun, dukungan turun menjadi hanya 33% pada April 2016. Jajak pendapat menunjukkan bahwa ketika ditanya secara khusus tentang pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika, oposisi umumnya jauh lebih tinggi: Pada Mei 2015, 53% orang Polandia keberatan menerima pengungsi dari daerah ini. Pada April 2016, jumlah ini meningkat menjadi 71% (Bachman, 2016).

Selain itu, sejak 2004 gerakan Asosiasi *Przyszłości Eropa* (Masa Depan Eropa), dengan portal online *euroislam.pl*, telah menjadi organisasi online Islamofobia yang paling vokal, dengan 17.000 pengikut *Facebook* dan *euroislam.pl* menarik 100.000 pengunjung per bulan pada 2016. Ada demonstrasi oleh 150 peserta di depan pembangunan masjid di Ochota Warsawa (tahun 2010). Bahkan terjadi serangan terhadap masjid di Ochota dan masjid yang dibangun ratusan tahun sebelumnya oleh komunitas asli Tatar. Kegiatan online lainnya adalah *Nie d Islamizacji Europy* (Bukan untuk Islamisasi Eropa), dengan 348.000 pengikut *Facebook* pada Januari 2017, 26 dan *Stop Europ Islamizacji* (Stop Islamisasi Eropa) dengan 64.000 pengikut sosial yang secara terang-terangan menolak pengungsi dan protes terhadap Islam di Polandia (Hafeez, 2017). Sehingga keberadaan *functional actor* memperkuat anggapan bahwa pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika adalah aktor fungsional yang mengancam keamanan nasional. Justifikasi pengungsi Timur Tengah dan Afrika sebagai ancaman adalah isu terorisme dan radikalisme dari sebagian besar pengungsi muslim seperti yang terjadi di Prancis tahun 2015.

Pemerintah Polandia berpendapat, seharusnya pengungsi tersebut meminta bantuan ke negara muslim lain seperti Qatar dan Saudi Arabia, bukan Eropa (pernyataan Tarczynski di Al Jazeera, 2019). Mereka merasa Polandia akan lebih aman tanpa terkait isu terorisme dari negara berkembang. Namun demikian, bukan berarti mereka tidak ramah terhadap imigran, selama mereka memenuhi syarat, tidak akan masalah. Pemerintah Polandia bahkan menerima pengungsi dari Ukraina dengan kuota hingga dua juta jiwa. Keputusan tersebut didasari oleh kepentingan nasional dan mencegah bom waktu yang meledak ke Polandia apabila jumlah pengungsi terus menerus bertambah.

Tidak dipungkiri, kebijakan ini cenderung bertentangan dengan Uni Eropa terkait relokasi pengungsi. Di level regional, Polandia menghadapi kecemasan beberapa negara eropa lain karena dianggap hanya ingin mendapatkan dana dari Uni Eropa

tanpa memenuhi kewajiban sebagai anggota. Pembagian jumlah pengungsi ke beberapa negara Eropa sebagai komitmen untuk mewujudkan di Eropa sebagai teritorial aman dan mendorong hak-hak dasar kemanusiaan. Eropa memberikan sanksi tetap membuka *border*, meski Polandia menolak.

Proses sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor negara dengan melihat adanya ancaman dari pengungsi merupakan langkah preventif pemerintah Polandia untuk melindungi keamanan nasionalnya. Alasan keamanan nasional menjadi justifikasi sebuah negara untuk membuat kebijakan tertentu. Polandia menjadi salah satu negara paling aman di Eropa, mengingat angka terorisme rata-rata nol sejak tahun 1971-2017. Pada tahun 2016 terdapat 2 serangan teroris dan tahun 2017 terdapat satu serangan teroris (Statista Research Department, 2019). Mengutip pertanyaan Weiner bahwa migrasi dapat menjadi ancaman ketika imigran dan pengungsi memberikan resiko politik dan mempengaruhi identitas suatu negara. Sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Polandia terhadap isu migrasi menguat oleh dua alasan di atas.

Dalam prosesnya, Agen sekuritisasi, khususnya petinggi partai *Law and Justice* memberikan sikap yang tegas terhadap respon mereka kepada migran. Keterlibatan aktor ini menjadikan unsur peran *securitizing actor* yang kuat. Selain pimpinan negara, media juga memberikan pengaruh signifikan dalam membentuk opini masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa isu tersebut menjadi sebuah ancaman. Seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat perbedaan pandangan pada bulan Mei 2015 ke bulan April hingga akhir Mei 2015 mengenai respon masyarakat terhadap keterbukaan terhadap migran migran.

Ada upaya masyarakat mempertahankan homogenitas untuk menjaga keamanan nasional (Al Jazeera, 2019). Perbedaan tersebut seharusnya dihormati oleh Uni Eropa sebagai satu kesatuan. Setiap negara tidak dapat dipaksa untuk menerapkan aturan yang general karena latar belakang sejarah Polandia dengan Jerman atau Prancis sangat berbeda. Polandia tidak memiliki koloni seperti Jerman sehingga tidak ada tanggung jawab moral terhadap negara-negara jajahan.

Dengan demikian, proses sekuritisasi migrasi di Polandia pasca krisis migrasi di Eropa 2015 dapat dikatakan cukup sukses karena keberhasilan pemerintah untuk menggiring ide "migran sebagai ancaman" cukup sukses meyakinkan *referent object* untuk menolak pengungsi yang masuk. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hafeez (di tinjauan pustaka) mengenai penolakan masyarakat terhadap migran pasca pemilu 2015. Selain itu "*functional condition*" dimana meningkatnya populisme, pengaruh media dan organisasi mendorong isu ini sebagai sebuah ancaman.

KESIMPULAN

Setiap negara menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan regional, maupun internasional. Seringkali perubahan kekuasaan juga mempengaruhi preferensi kebijakan. Dalam kasus Polandia, sekuritisasi isu migrasi mulai dilakukan pada saat Pemilu 2015 hingga saat ini. Kemenangan berturut-turut partai *Law and Justice* menghasilkan kebijakan tegas terhadap penutupan perbatasan untuk pengungsi. Yang menguatkan sekuritisasi di Polandia adalah karakter masyarakat yang homogen dan pengaruh media dan organisasi lokal sehingga menggiring opini publik tentang migran sebagai ancaman. Sementara itu, organisasi regional menuntut peran Polandia dalam menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan lainnya.

Melalui fenomena tersebut dapat diketahui bahwa proses sekuritisasi dapat dilakukan oleh sebuah negara karena adanya perluasan isu yang diamini secara bersama-sama dalam kerangka intersubjektivitas. Dengan demikian, perubahan status isu imigrasi yang awalnya merupakan dukungan dan saat ini dianggap menjadi ancaman dikarenakan proses sekuritisasi yang dilakukan oleh rezim baru di Pemerintah Polandia sejak 2015. Namun demikian, pada Pemilu Presiden Polandia tahun 2020, kemenangan tipis calon *incumbent* (51,2%) dengan partai *Civic Platform* bisa jadi mengubah peta politik Polandia ke depannya (BBC, 2020). Beberapa organisasi sosial mulai menyuarkan anti radikalisme di Polandia seperti *Never Again Association* (Never Again, 2020) and *IBS Foundation*. Hal ini dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian berikutnya. Hal terpenting adalah bagaimana masyarakat global bisa merespon krisis migrasi dengan cara yang paling bijak.

REFERENSI

- Al Jazeera. (2019). *Polish MP: "For me, multiculturalism is not a value" | UpFront (Headliner)*. Author. <https://www.youtube.com/watch?v=ccOp0l8ZPho>
- Bachman, Bart.(2016). *Diminishing Solidarity: Polish Attitudes toward the European Migration and Refugee Crisis*. Published on 16 June 2020 accessed by <https://www.migrationpolicy.org/article/diminishing-solidarity-polish-attitudes-toward-european-migration-and-refugee-crisis> [30/05/2020]
- BBC. 2020. *Poland's Duda narrowly beats Trzaskowski in presidential vote*. <https://www.bbc.com/news/world-europe-53385021> [17/07/2020]
- Bello, V. (2017). *International Migration and International Security: Why Prejudice is a Global Security Threat*. Routledge.
- Borbeau, P. (2011). *The Securitization of Migration : a study of movement and order*. Routledge.
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security : A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner Publishers Inc.
- Castles, S., Miller, M., & de Haas, H. (2013). *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World* (5th ed.). Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1080/10803920500434037>
- Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Euronews. (2018). *Poland Refuses Mid East Migrants*. https://www.youtube.com/watch?v=_z9k2JN6iVI
- France24 English. (2017). *"We want to be part of the European family, but we want respect!" - Polish MP*. <https://www.youtube.com/watch?v=nBWVuzG8h3Y>
- Fredriksson, E. (2019). *Poland's golden age of growth*. East Capital. <https://www.eastcapital.com/fr-LU/Look-East/News-articles/Articles-2019/Poli-golden-age-of-growth/> [02/04/2020]

- Hafez, Farid. (2018). Street-level and government-level Islamophobia in the Visegrád Four countries. Accessed by <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0031322X.2018.1498440> [3/6/2020]
- Hartono, Budi. 2018. Copenhagen School : Sekuritisasi. https://www.academia.edu/10012303/Copenhagen_School_Sekuritisasi. [16/07/2020]
- Huysmans, J. (2006). *The Politic of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in EU* (New Intern). Routledge.
- Jaskulowski, K. (2019). *The Everyday Politics of Migration Crisis in Poland*. Palgrave Pivot.
- Komorowski, B. (2015). *Letters : Our duty in central Europe is to show compassion to refugees*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2015/sep/22/our-duty-in-central-europe-is-to-show-compassion-to-refugees>
- Morath, A. (2017). *'Poland for the Polish'? Taking a Closer Look at the Polish Rejection of Refugees*. Heinrich Boll Stiftung Brussels.
- Never Again. 2020. Never Again Association : Mission. <https://www.nigdywiecej.org/en/> [17/7/2020]
- Polish Center for International Aid. (n.d.). *Lebanon. Assistance for Syrian refugees*. Author. Retrieved May 3, 2020, from <https://pcpm.org.pl/en/our-projects/lebanon>
- Public Opinion Research Center. (2016). *Polish Public Opinion. Author, 4*. http://www.cbos.pl/PL/publikacje/public_opinion/2016/04_2016.pdf
- Quell, M. (2020). *EU Court Says Countries Didn't Meet Refugee Quotas*. Courthouse News Service. <https://www.courthousenews.com/poland-hungary-czechs-broke-human-rights-law/>
- Rankin, J. (2019). *EU Court Rules Three Member States Broke Law Over Refugee Quotas*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/law/2020/apr/02/eu-court-rules-three-countries-czech-republic-hungary-poland-broke-law-over-refugee-quotas>
- Statista Research Department. (2019). *Poland: incidences of terrorism 1971-2017*. Author. <https://www.statista.com/statistics/541402/incidences-of-terrorism-poland/>
- The Common European Asylum System (CEAS). (2016). *Common European Asylum System*. Author. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2017). *UNHCR's Strategic Directions 2017-2021*. Author. <https://www.unhcr.org/excom/announce/5894558d4/unhcrs-strategic-directions-2017-2021.html>

Weiner, M. (1990). Security, Stability and International Migration. In *Center of International Studies*. Massachusetts Institute of Technology.
http://web.mit.edu/ssp/publications/working_papers/WP-90-2.pdf

Wiącek, E. (2017). Poland's Refugee Policy and Polish Society Between Values of Survival and Self-Expression. *Cultures, Values, Identities*, 1(2), 165–188.